

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara. Tugas partai politik adalah sebagai penghimpun dan penyambung kehendak masyarakat yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk-bentuk rumusan kebijakan oleh perwakilannya baik di Lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Partai politik memiliki peran yang juga fundamental dalam masyarakat secara langsung selain sebagai penyambung, yakni melakukan pendidikan politik sebagai fungsi partai politik yakni melakukan sosialisasi politik. Dalam proses sosialisasi politik, terdapat dua hal yang dilakukan partai politik yakni melakukan pendidikan dan indoktrinasi politik (Surbakti, 1992: 117). Pendidikan politik dapat dilakukan dengan cara yang secara langsung memberikan ilmu dalam ruang-ruang formil dan ruang-ruang bernegara. Lebih dari itu, perilaku anggota dan kader partai dalam prosesi menjalankan pemerintahan menjadi cerminan untuk masyarakat dan menjadi bagian dari pendidikan politik. Namun hal ini bisa menjadi kekurangan karena dalam dinamika partai politik, kerap kali perbuatan yang destruktif terjadi dalam proses politik yang dilakukan oleh anggota atau kader partai. Indoktrinasi yang merupakan bagian dari sosialisasi politik juga tak lepas dari penyampaian nilai dan sosialisasi kepada warga negara yang dilakukan partai politik. Indoktrinasi bisa dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik pula. Pembuatan wacana, penyampaian pesan politik dan sikap otoriter dan kontra demokratis bisa jadi menghasilkan suatu hal yang buruk bagi masyarakat. Apabila proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik terus menerus dilakukan secara negatif maka akan berpotensi menjadi budaya buruk dalam sistem politik.

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peran yang besar. Partai politik secara ideal berkewajiban terlibat dalam memprakarsai demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Perwujudannya adalah

melaksanakan praktek demokrasi dengan sesuai aturan, memberikan dorongan masyarakat untuk turut serta melaksanakan demokrasi, serta harus selalu aktif dalam melakukan upaya pembangunan demokrasi. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, Partai politik belum mampu melakukan transformasi dari sistem dan budaya politik yang tidak demokratis menuju sistem dan budaya politik yang demokratis. Ketidakmampuan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang ideal karena partai politik tidak berkehendak mewujudkannya. Sifat partai politik lebih-lebih pimpinan partai politik adalah ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya.

Indonesia sebagai sebuah negara telah mengalami perjalanan politik dalam beberapa rezim pemerintahan (melalui proses politik yang panjang beserta dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya). Indonesia sudah mengalami periode kemerdekaan, orde lama, orde baru dan saat ini reformasi. Dalam proses perjalanan politik yang demikian telah dilewati oleh Bangsa Indonesia, partai politik memiliki peran penting karena partai politik sebagai wadah berkumpulnya buah pemikiran yang bertujuan untuk menyalurkan pemikiran tersebut dalam bentuk keputusan politik. Dari banyaknya rezim, pemerintahan orde baru bisa dikatakan yang paling jauh dari nilai-nilai demokrasi. Akar dari banyaknya permasalahan Indonesia pada masa orde baru bermuara kepada kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan karena pemerintah otoriter. Pemerintahan orde baru dengan segala permasalahan ada berlangsung sangat lama, ditandai dari pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Proses tersebut kemudian membuat budaya politik di Indonesia yang demikian buruknya. Kondisi yang demikian kemudian digugat sehingga munculah masa reformasi sebagai satu bentuk perubahan terhadap kondisi-kondisi yang buruk tersebut. Masa reformasi ini sebagai masa untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kondisi sehingga hadir tatanan baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal paling utama digagas adalah melakukan demokratisasi terhadap berbagai tatanan pemerintahan.

Dalam proses menuju kondisi tatanan negara yang baru, peran partai politik menjadi lebih fundamental. Partai politik yang menjalankan berbagai

macam fungsi tentu harus menjadi bagian dari perubahan, lebih-lebih karena peranan partai politik menyalurkan aspirasi. Kondisi-kondisi yang tidak ideal pada masa sebelum reformasi juga merupakan akibat dari kiprah partai politik melalui penguasa-penguasa partai politik yang menjalankan pemerintahan pada masa orde baru. Partai politik kemudian harus menjadi bagian dalam reformasi agar tatanan baru bisa terwujud. Dalam kenyataan yang terjadi, partai politik malah menjadi bagian yang tidak melakukan reformasi secara sepenuhnya sehingga tidak mampu mewujudkan pembaharuan dalam pemerintah Indonesia.

Permasalahan pertama, personalisasi partai politik oleh kekuasaan/otoritas penguasa partai. Personalisasi partai politik adalah suatu keadaan dimana partai politik sangat didominasi oleh seorang aktor atau elite di dalam partai politik. Dominasi tersebut merupakan bentuk pengaruh yang ada dalam partai politik oleh seseorang saja. Bentuk pengaruh tersebut sangat melekat dalam partai politik dan menjadi wajah partai politik mengesampingkan partai politik sebagai suatu wadah kolektif untuk menyalurkan aspirasi banyak orang. Umumnya personalisasi ini dilakukan oleh pemegang jabatan struktural dari ketua umum partai politik. Sebagai contoh PDIP dengan Megawati Soekarnopuri, Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Gerindra dengan Prabowo Subianto, dan Nasdem dengan Surya Paloh. Personalisasi partai politik ini membuat masa kepemimpinan dari ketua umum sangat lama karena dominasinya dalam partai politik. Dikatakan oleh Syamsudin Haris, Lili Romli, Alfian Alfian dan Eko Prasjo (2018) dalam penelitiannya yang bertajuk “Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi” bahwa seolah-olah partai politik merupakan suatu kendaraan sentralisasi kekuasaan partai politik daripada sebuah institusi demokrasi untuk melakukan perubahan terhadap sebuah negara (Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi).

Permasalahan kedua, kartelisasi partai politik yang terjadi dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Menurut Kuskrido Ambardi (2009) ada kecenderungan partai politik melakukan kartelisasi. Dikatakan ada lima temuan mengenai kartelisasi partai yang terjadi di era reformasi yakni Ideologi yang

mengalami kelunturan karena hanya sebagai penarik suara tapi tidak menjadi penentu koalisi, permisifnya koalisi, oposisi yang tidak muncul, hasil pemilu tidak menjadi pengaruh dalam pembentukan perilaku partai, partai politik cenderung Bersatu menjadi satu kelompok untuk memiliki tujuan kolektif. Kelima hal ini Kuskrido mengambil benang merah bahwa partai politik cenderung memiliki misi melakukan *rent seeking* (perburuan rente) untuk mencari pemasukan keuangan partai politik. Hal ini menjadi sangat berbahaya karena perilaku ini terjadi secara kolektif. Partai politik sebagai pemegang peranan mengelola negara malah melakukan praktek-praktek mencari keuntungan pribadi atau kelompok yang sebenarnya hal ini juga menjadi bagian dari gugatan terhadap rezim sebelumnya yakni perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Permasalahan ketiga, Kerjasama partai politik dengan oligark. Jeffrey Winters (2009) mengatakan bahwa oligarki merupakan bentuk pemerintahan oleh segelintir orang yang berangkat dari asal kata bahasa Yunani, *oligarkhia* yang dipecah *oligoi* (dalam Bahasa Indonesia artinya segelintir) dan *arkhein* (dalam Bahasa Indonesia artinya yang memerintah). Oligarki sendiri dapat merujuk pada kekuasaan bukan segelintir orang, melainkan satu orang yang berkuasa. Adapun terminologi lain yang merupakan gabungan beberapa pakar yang kemudian dicetuskan oleh Leonard Whibley (1986) bahwa oligarki merupakan bentuk struktur kekuasaan dimana kekuasaan efektif berada ditangan kelas elite yang dibedakan berdasarkan royalti, kekayaan, hubungan kekeluargaan, komersial, dan atau legitimasi kekuatan militer. Dalam hal partai politik melaksanakan kerjasama dengan oligarki, banyak kecenderungan bahwa porsi keuntungan lebih banyak diterima oleh oligark daripada yang terdistribusi kepada masyarakat. Lebih-lebih kesepakatan-kesepakatan biasanya berkenaan dengan penguasaan atas sumber daya untuk dikelola oleh elite.

Dalam konteks Indonesia saat ini, kemudian ada catatan dimana demokrasi secara penuh belum dapat diwujudkan, lebih-lebih oleh partai pemenang pemilu 2019 yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sosok Megawati sebagai ketua umum semenjak PDIP dideklarasikan belum tergantikan oleh kader-

kader lain. Suksesi kepemimpinan PDIP di luar trah Sukarno tidak dapat diwujudkan. Sebagai contoh, pada kongres I PDIP, Eros Djarot dan Dimiyati Hartono yang gagal mencalonkan diri sebagai ketua kemudian mundur dan mendirikan partai politik baru. Contoh lain adalah kongres PDIP tahun 2004. Roy B. B. Janis dan Laksamana Sukardi yang berkehendak untuk melakukan perubahan kepemimpinan karena PDIP kalah total dalam pemilu 2004 malah dipecat. Gagasan yang ditawarkan adalah melakukan perubahan kepemimpinan karena PDIP yang pada saat reformasi menentang kepemimpinan mutlak Suharto malah melakukan hal yang sama dengan melakukan penguatan atas kepemimpinan mutlak Megawati. Adapun dalih yang dikatakan Taufik Kiemas adalah Megawati menjadi pemimpin partai secara terus menerus untuk menjaga stabilitas politik dan NKRI.

Dengan dinamika kepemimpinan partai yang tidak dinamis dan terbatas ini membuat partai politik minim inovasi dan perkembangan. Permasalahan partai politik pada masa reformasi adalah Kelembagaan Partai Politik. Kelembagaan partai politik yang baik akan mendorong pelaksanaan fungsi partai politik yang benar-benar dapat bermanfaat untuk pembangunan dalam pemerintahan yang asosiatif dengan kepentingan masyarakat (Romli, 2011). Untuk mendorong kelembagaan partai politik yang baik salah satunya adalah manajemen konflik di dalam internal partai politik. Permasalahan yang kerap muncul adalah faksionalisme di dalam partai politik. Faksionalisme ini dapat menjadi destruktif apabila tidak muncul manajemen yang baik. Manajemen konflik yang baik menurut Lili Romli (2011) adalah demokrasi internal. Demokrasi internal ini berarti harus ada aturan atau prosedur yang impersonal agar tidak ada kontrol yang sewenang-wenang dari pimpinan partai. Kondisi ini nyatanya banyak yang belum terjadi karena aturan di dalam kelembagaan partai politik masih bersifat sentralistik. Banyak sifat pemimpin partai yang tidak demokratis guna melanggengkan kekuasaannya. Argumentasi mengenai demokrasi internal dan kepemimpinan dalam partai politik ini diperkuat oleh Mainwaring dalam Diamond dan Plattner (2001) yang menyatakan bahwa untuk memperkuat kelembagaan partai politik adalah “Dalam partai politik yang melembaga, sumber daya partai politik telah

mencukupi, baik secara materi maupun secara sumber daya manusianya. Kepemimpinan partai politik tidak dibayangi oleh kepentingan pemimpin secara individu dan proses kelembagaannya tidak berlangsung dengan baik.”

Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam kelembagaan partai politik umumnya terjadi dalam tingkat pusat. Sementara, dalam proses demokrasi dan desentralisasi di Indonesia, partai politik memiliki struktur secara vertikal yakni pengurus tingkat daerah. Dalam upaya untuk mewujudkan demokrasi, maka proses demokratisasi gagasan dari tingkat daerah pun harus bisa terdistribusi dan teramplifikasi hingga tingkat pusat. Yang menjadi bagian dari pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses demokrasi internal untuk membangun kelembagaan partai politik mulai dari tingkat struktur terkecil dari partai politik? Atau bahkan tidak timbul kesadaran dari struktur terbawah bahwa perlu penguatan atas kelembagaan partai politik untuk meningkatkan kualitas partai politik sehingga pertanyaan sebelumnya bahkan tidak muncul. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengangkat mengenai kelembagaan partai politik terkhusus pola kelembagaan yang terjadi di tingkat lokal atau di tingkat daerah dengan memperhatikan fenomena-fenomena dalam mekanisme kelembagaan yang terjadi di tingkat daerah. Studi kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya dengan Pemilihan Bakal Calon Kepala Daerah dalam hal ini adalah Walikota. Adapun alasan studi kasus yang diangkat adalah PDIP merupakan partai pemenang pemilu 2019 sehingga sebagai partai pemenang memiliki peran yang besar untuk meningkatkan kualitas kelembagaannya karena secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada kondisi di pemerintahan. Dampak secara langsung maupun tidak langsung tersebut dapat berupa kebijakan, stabilitas politik nasional, kekuatan memobilisasi dan pendidikan politik di tingkat akar rumput (masyarakat). Sementara, alasan mengapa ruang lingkup yang diangkat adalah PDIP Surabaya karena Surabaya merupakan salah satu basis kultural kuat dan salah satu cabang yang penting. Lebih dari itu, Surabaya merupakan kota yang bisa dibilang cukup maju dari segi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam melihat perspektif

kelembagaan partai politik dari sudut pandang pimpinan partai politik di Surabaya maka akan mendapat tolak ukur yang cukup komprehensif

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pemilihan calon walikota yang diusung oleh PDIP pada pilwali 2020 dalam perspektif kesisteman pelemabagaan partai politik?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penentuan calon walikota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemilihan calon walikota yang diusung oleh PDIP pada pilwali 2020 dalam perspektif kesisteman pelemabagaan partai politik.
2. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dalam penentuan calon walikota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini di diharapkan mampu menjadi bagian dari pendalaman literatur dan informasi terkait dengan pembangunan kelembagaan partai politik. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu referensi untuk peneliti melakukan kajian tentang kelembagaan partai politik

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini mampu memberikan dampak bagi partai politik untuk melakukan pembangunan demokrasi dan kelembagaan yang lebih baik sehingga partai politik mampu memiliki peran untuk membangun bangsa dan negara Indonesia.

1.5. Kerangka Teori: Pelembagaan Partai Politik Randall dan Svasand

Teori-teori yang berkembang mengenai kelembagaan partai politik dikemukakan oleh Samuel Huntington. Huntington berpandangan bahwa partai politik harus melakukan pelembagaan. Pelembagaan sendiri memiliki arti bahwa di dalam suatu organisasi harus memperoleh stabilitas atau nilai baku. Menurut Huntington (1958) dalam *“Political Order in Changing Societies”*, proses sebuah lembaga mencapai tingkat yang baik secara kelembagaan ditunjukkan dari kemampuan melakukan adaptasi, kompleksitas, otonomi dan koherensi antara organisasi dengan prosedur. Apabila keempat hal ini benar-benar ada dan dapat diukur maka tingkat pelembagaan dapat dikomparasikan dengan sistem politik yang berlaku. Poin pertama dalam pelembagaan adalah adaptasi. Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki pelembagaan yang tinggi apabila organisasi tersebut baik secara keorganisasian maupun secara prosedural memiliki kemampuan beradaptasi, begitupun sebaliknya, apabila organisasi tersebut tidak memiliki kemampuan beradaptasi atau kaku secara prosedural dan keorganisasian maka organisasi tersebut memiliki tingkat pelembagaan yang rendah. Yang dimaksud dengan kemampuan beradaptasi sendiri adalah karakter organisasi. Umumnya karakter ini hadir dari jam terbang, usia dan bagaimana organisasi mampu melewati tantangan yang dihadapi. Dijelaskan pula oleh Huntington (1968) bahwa organisasi yang lebih tua cenderung lebih mudah beradaptasi daripada organisasi yang lebih muda, cenderung memiliki kekakuan. Organisasi yang tua pun sebenarnya bisa jadi tidak adaptif karena statisnya lingkungan organisasi atau tidak terlatih dengan tantangan atau masalah yang dihadapi. Apabila dapat dipahami bahwa perbedaan tantangan tidak mungkin sama dialami setiap organisasi maka secara kasar kemampuan adaptasi dapat dibagi sesuai umum. Adapun penjelasan mengenai umur organisasi dibagi menjadi tiga.

1. Usia kronologis. Semakin lama sebuah organisasi atau sebuah prosedur di dalamnya ada, maka semakin terlembaga organisasi tersebut. Umur sebuah organisasi menjadi salah satu tolak ukur tingkat kemungkinan organisasi

tersebut akan selalu ada. Argumentasi utamanya adalah tidak mungkin institusi politik dapat diciptakan dalam kurun waktu satu malam saja.

2. Usia generasi. Hal ini erat kaitannya dengan pimpinan organisasi. Selama pimpinan organisasi yang menjabat masih pimpinan yang mendirikan organisasi tersebut maka organisasi tersebut belum dapat dibilang terlembaga. Organisasi yang terlembaga harus sudah teruji dari sisi suksesi kepemimpinan, bagaimana kemudian dinamika suksesi itu mampu terlewati secara konsisten. Organisasi yang terlembaga dalam periodisasi pergantian pemimpin harus berjalan seiring dengan pergantian generasi pemimpin. Tanpa pergantian generasi maka kelembagaan yang maksimal juga tidak terjadi.
3. Fungsional. Organisasi umumnya diciptakan untuk memiliki fungsi tertentu. Apabila dalam suatu masa fungsi tersebut sudah tidak diperlukan kembali karena tujuan organisasi tersebut didirikan sudah tercapai maka suatu organisasi akan mencapai titik krisis terbesarnya. Dalam posisi tersebut Huntington mengatakan terdapat dua hal yang dapat dilakukan yakni menemukan fungsi baru atau keruntuhan organisasi. Organisasi yang sudah terlembaga maka mampu melakukan adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan yang ada sehingga mampu menemukan fungsi barunya.

Selanjutnya adalah kompleksitas. Semakin rumit sebuah lembaga maka semakin tinggi tingkat kelembagaannya. Hal ini umumnya berkaitan dengan tujuan, fungsi dan struktur dalam suatu organisasi. Dikatakan oleh Huntington bahwa sangat memungkinkan suatu organisasi atau lembaga melakukan penggandaan sub-unit. Sub-unit ini memiliki manfaat yakni memberi daya tambung untuk anggota organisasi tersebut. Lebih-lebih sub-unit yang bervariasi akan memberi kemampuan suatu organisasi untuk memelihara loyalitas para anggotanya. Sistem politik juga berdampak pada apakah suatu lembaga dapat memiliki kelembagaan yang maksimal. Sistem politik tradisional memiliki kecenderungan primitif dan sederhana. Hal ini akan membuat suatu organisasi akan memiliki kelembagaan yang tidak maksimal karena lingkungan membentuk karakter yang tidak mampu menghadapi tantangan zaman. Sistem yang kompleksitasnya tinggi akan membuat

sebuah organisasi akan mampu terlatih menghadapi rintangan-rintangan. Sistem politik yang mengandalkan individu menjadi sistem politik yang paling sederhana. Sistem ini dikatakan oleh Aristoteles dalam Huntington sebagai sistem tirani yang menjadi sistem paling tidak stabil dan berumur paling pendek. Sistem lain yang memiliki lembaga dengan jumlah lebih banyak dan tidak mengandalkan individu cenderung lebih mampu untuk beradaptasi sehingga lebih terlembaga.

Poin ketiga adalah otonomi dan subordinasi, atau determinasi kepemimpinan atas pengambilan keputusan lembaga. Variabel lain untuk melihat kelembagaan suatu organisasi adalah otonomi. Sebuah lembaga akan memiliki kelembagaan yang baik apabila organisasi tersebut memiliki independensi dalam melakukan penataan organisasi dan prosedurnya. Dalam sistem politik yang maju, lembaga politik yang terlembaga lebih memiliki integritas dari sistem politik yang cenderung lebih terbelakang. Dalam artian yang lebih konkret, hubungan lembaga politik melibatkan kekuatan sosial, kelompok bisnis atau pengusaha dan aktor-aktor lain namun tidak membuat lembaga politik menjadi pihak yang dapat diintervensi karena memiliki integritas kelembagaan. Lembaga politik yang otonom dapat diukur dari sejauh mana tujuan, kepentingan dan nilai yang mereka miliki dapat dibedakan dari lembaga yang lain. partai politik karena pada pendiriannya, yang terikat kepentingan hanya pada satu kelompok dalam masyarakat baik buruh, bisnis, atau petani akan menjadi kurang otonom daripada partai politik yang mengartikulasikan dan menggabungkan kepentingan beberapa kelompok secara sekaligus. Terakhir, koherensi. Semakin bersatu dan koherennya suatu organisasi maka akan semakin terlembaga organisasi tersebut. Organisasi memerlukan sebuah konsensus yang kemudian konsensus ini harus menjadi sebuah alat untuk mengikat anggota-anggota di dalamnya. Untuk meminimalisir terjadinya suatu perpecahan, suatu organisasi memerlukan prosedur dan batas-batas fungsional. Prosedur dan batas-batas fungsional ini pun juga harus menjadi bagian daripada consensus bersama agar solidaritas dan semangat kolektif membentuk dan melembaga. Pihak-pihak yang aktif harus menjunjung tinggi kehadiran konsensus yang ada.

Huntington (1968) mengemukakan, mengenai koherensi dan otonomi, sebenarnya keduanya bisa jadi sangat berkaitan erat meskipun sebuah organisasi dapat menjadi koheren tanpa perlu otonom dan dapat menjadi otonom tanpa koheren. Pada kenyataannya, keduanya sangat berkaitan erat karena otonomi dapat menjadi salah satu upaya menjadikan sebuah organisasi menjadi koheren. Sebuah organisasi yang koheren dan otonom akan sangat mungkin menumbuhkan semangat dan ciri khas organisasi yang menjadi identitas atau karakter yang melekat di dalam sebuah organisasi. Otonomi akan membuahkan sebuah organisasi terjaga dari intervensi eksternal, namun tidak menjaga dari gangguan internal. Otonomi akan membuahkan organisasi bertumbuh karena menarik minat masyarakat untuk bergabung sehingga secara kuantitas organisasi akan berkembang. Sementara pertumbuhan jumlah anggota akan membuahkan koherensi menjadi terancam.

Teori yang kemudian melengkapi teori kelembagaan yang dikemukakan Huntington merupakan teori yang di paparkan oleh Randall dan Svasand (2002) dalam bukunya yakni *"Party Institutionalization in New Democracies"*. Randall dan Svasand (2002) disini hadir juga untuk menjadi pelengkap dari teori yang dikemukakan oleh Huntington. Dasar teoritik dari teori kelembagaan ini karena kondisi dunia sudah mulai berubah. Banyak negara kemudian memasuki era demokrasi meninggalkan era ototitarian. Dalam demokrasi partai memiliki peran yang penting dalam melakukan konsolidasi demokrasi dalam suatu proses transisi dan demokratisasi.

Pembahasan mengenai proses transisi sebuah pemerintahan menuju demokrasi membuahkan banyak ilmuwan politik melakukan pembahasan mengenai kualitas partai yang mana yang menjadi esensi untuk proses demokratisasi yang baik atau sistem partai seperti apa yang dapat membuahkan partai kondusif. Kriteria yang kemudian menjadi penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi dikemukakan oleh Randall dan Svasand (2002) yang penting adalah pelebagaan partai politik. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa pakar lain seperti Mainwaring, Lewis, Diamond, Dix dan Scully. Kajian mengenai pelebagaan partai politik sebelumnya memang sudah banyak dilakukan oleh pakar-pakar dan ilmuwan politik.

Namun, Randall dan Svasand dalam hal ini menyoroti bahwa terdapat beberapa penjelasan yang tidak konsisten dan penjelasan yang kurang mendalam dalam beberapa karya. Lebih lanjut, kajian mengenai pelebagaan partai politik ini terlalu berfokus kepada negara industri yang sudah mapan serta negara demokrasi yang sudah maju sedangkan minim menyinggung negara dunia ketiga dan negara yang baru melakukan demokrasi.

Diskusi teoritik yang hadir dari konsep yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand bermula dari ilmuwan politik yang spesifik membahas mengenai teori kelembagaan partai yakni Huntington, Panebianco yang kemudian dielaborasi dan diulas oleh Levitsky dan Janda. Konsep mengenai kelembagaan partai politik antara Huntington dan Panebianco memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut dideskripsikan oleh Levitsky sebagai *value infusion* (suatu kondisi dimana terdapat suatu nilai yang hidup diluar daripada persyaratan teknis yang ada). Kemudian Janda mengemukakan bahwa kelembagaan eksternal juga perlu terwujud. Yang dimaksud adalah bagaimana partai politik dapat hidup dalam pikiran masyarakat baik itu dari sisi ideologi, citra dan sebagainya.

Konsep mengenai kelembagaan yang telah ada kemudian dielaborasikan dan diolah dengan melakukan diferensiasi dimulai dari pendekatan yang ada. Randall dan Svasand membedakan antara organisasi dan institusi yang mana organisasi belum tentu merupakan institusi dan organisasi pada tingkat variabel tertentu dan dari waktu ke waktu dapat berubah menjadi lembaga. Partai politik merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan sengaja dan dengan aturan dan tujuan formal yang mana pelebagaanya tidak identik dengan kerangka organisasi murni. Randall dan Svasand (2002) kemudian membedakan aspek internal dan eksternal dalam proses mewujudkan partai politik yang mapan. Aspek internal berkaitan dengan perkembangan partai di dalam sementara aspek eksternal hubungan antara partai dengan masyarakat termasuk dengan institusi lain yang ada.

	Internal	External
Structural	Systemness	Decisional autonomy
Attitudinal	Value infusion	Reification

Figure 1. Dimensions of party institutionalization

Gambar 1.

Sumber: Randall, V., & Svasand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8, 5-29. Hal. 72

Gambar tersebut menjelaskan mengenai instrument yang ada dalam sistem dan pelembagaan partai politik sebagai organisasi. Aspek Internal dan Eksternal dalam kelembagaan partai politik kemudian di distribusikan kembali oleh Randall dan Svasand (2002) menjadi *Systemness*, *Value Infusion*, *Decisional Autonomy* dan *Refication*. *Systemness* (kesisteman) merupakan suatu variabel struktural partai yang berasal dari bagaimana sebuah sistem internal mampu memperluas, memperpadat dan membuat keteraturan interaksi yang mana hal ini mengisyaratkan bahwa akan membuat kesepakatan umum dari perilaku. Di dalam partai pengembangan sistem ini dipandang merupakan penjabaran struktur yang formal berkenaan dengan fungsi partai politik itu sendiri yang berkenaan juga dengan bagaimana aturan dan mekanisme operasional dapat dibuat secara komprehensif.

Dalam kasus negara dunia ketiga, variabel untuk melihat apakah suatu partai politik sudah memiliki kelembagaan yang baik dibagi oleh Randall dan Svasand menjadi *origins*, *resource*, *leaderships*, *factionalism*, dan *clientelism*. *Origins* (asal mula partai) merupakan salah satu melihat partai politik dari bagaimana partai terbentuk. Panebianco menjelaskan bahwa terdapat penetrasi pembentukan, yakni, penetrasi dari pusat ke pinggiran atau dari masyarakat bawah ke masyarakat elite. Panebianco menambahkan bahwa semakin banyak penetrasi maka akan semakin terlembaga suatu partai. *Resource* (sumberdaya) menjadi salah satu faktor yang penting untuk melihat apakah suatu partai terlembaga. Di negara dunia ketiga yang memasuki era demokrasi, pendanaan menjadi sumberdaya yang penting karena untuk melakukan

konsolidasi demokrasi maka pemilu menjadi salah satu ajang. Sementara partai di satu sisi memerlukan suatu hal konkret untuk memenangkan pemilu sehingga hal ini menjadi penting untuk melihat bahwa pendanaan menjadi faktor internal penting. *Leaderships* (Kepemimpinan) merupakan suatu cara melihat kelembagaan yang selanjutnya. Partai politik yang sangat mengutamakan karisma pemimpin akan jauh dari kelembagaan. Randall dan Svasand mengatakan bahwa apabila partai politik yang tidak memiliki identitas yang mapan, maka tidak mengherankan bahwa partai akan ditunggangi oleh pihak yang memiliki sumber daya dan karisma. *Factionalism* (faksionalisme) merupakan salah satu variabel yakni kelompok yang lebih kecil dan relatif lebih terorganisir dan bersaing untuk keuntungan kekuasaan dalam kelompok yang lebih besar. Faksi memiliki kecenderungan untuk merusak kelembagaan partai politik karena memiliki tujuan dengan motif berbeda. *Clientelism* (klientelisme) merupakan sebuah praktek hubungan antara partai atau anggota partai dengan pendukung dengan harapan timbal balik lebih-lebih secara materiil. Praktek ini membuat kelembagaan menjadi terancam karena memungkinkan elemen personal di dalam partai politik membangun karir pribadi dan merusak kohesi.

Value Infusion (infus nilai) dijelaskan oleh Randall dan Svasand sebagai sebuah nilai dimana partai politik melekat kepada ideologi atau nilai sosial yang ada dalam sebuah masyarakat atau kelas sosial tertentu. Hal ini membuat partai politik sangat mudah diidentifikasi kepada suatu kelompok. Kekuatan massa pada kelompok diluar partai akan membuat partai menjadi terafiliasi secara tidak langsung dan hal ini akan menarik kelompok sosial ekonomi yang berkembang untuk tergabung pada partai politik melalui jaringan politik. Ini akan membuat tumbuhnya Gerakan melalui platform lain yang beridentitas sesuai dengan partai politik atau nilai dan karakternya.

Decisional Autonomy (otonomi pengambilan keputusan) konsep otonomi ini berkaitan dengan konsep yang dikemukakan oleh Huntington. Randall dan Svasand kemudian mendeskripsikan dengan keterlibatan eksternal seperti pemberian sponsor eksternal. Kehadiran pihak eksternal dalam urusan sumberdaya akan

membuat partai atau pimpinan partai kehilangan legitimasinya. Berbeda apabila sumberdaya hadir secara internal, justru hal tersebut akan memperkuat kelembagaan partai politik.

Reification (Reifikasi) Menurut Randall dan Svasand reifikasi merujuk bagaimana partai politik mampu terekam dalam imajinasi publik yang populer dan membentuk aktor partai politik. Reifikasi ini membuat partai akan terlembaga karena akan membentuk simbolisasi pada hal-hal kebendaan dan materi yang ada seperti identitas, logo partai serta yang paling utama bagaimana partai dikenal oleh masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh partai tersebut.

1.6. Konseptualisasi

1.6.1 Partai Politik

Partai Politik secara konseptual memiliki Ideologi yang kemudian diturunkan dalam cita-cita partainya dalam mengimplementasikan gerakannya. Dalam Surbakti, Wyron dan Joseph mengemukakan bahwa terbentuknya partai politik disebabkan beberapa hal, teori kelembagaan, teori situasi historic dan teori pembangunan. Berikut ini penjelasan mengenai terbentuknya partai politik.

Berkembangnya model negara dengan memisahkan pemerintahan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif berkenaan erat dengan teori kelembagaan sebagai asal-muasal terciptanya partai politik. Partai politik hasil bentukan pemerintah hadir untuk dapat mengakomodir kepentingan dan meningkatkan hubungan dengan rakyat, serta hal tersebut diharapkan mampu membuat rakyat memberikan dukungan kepada pemerintah. Partai politik bentukan pemerintah ini hadir karena kebutuhan dari legislator-legislatur untuk menjadi lebih dekat kepada rakyat sehingga mampu *me-maintaince* hubungan dengan masyarakat yang diwakili. Karena perkembangan masyarakat dan pola kehidupan, muncul sebuah kesadaran baru bahwa partai politik bentukan pemerintah tidak mampu mengakomodir kepentingan seluruh rakyat dan kemudian memicu kemunculan ide-ide untuk membentuk partai politik baru yang berasal dari kehendak masyarakat diharapkan

dapat menjadi suatu ruang untuk menghimpun pemikiran-pemikiran masyarakat dan akan diperjuangkan di dalam pemerintahan. Partai-partai yang terbentuk karena ketidakmampuan partai-partai bentukan pemerintah mengakomodir ini diprakarsai oleh pemimpin-pemimpin dalam skala yang lebih kecil karena memiliki kapasitas-kapasitas untuk mendirikan partai dan mampu menggalang kekuatan rakyat.

Dalam teori situasi historik, terbentuknya partai politik didasarkan pada konflik antara pemerintah dan masyarakat. Konflik ini bermula pada situasi masyarakat yang mana masyarakat yang awalnya tradisional menjadi masyarakat modern. Hal ini disertai beberapa kondisi yakni pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Pertambahan penduduk ini disertai percepatan perubahan pada sisi yang menunjang kehidupan penduduk seperti fasilitas Kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan, pertumbuhan ekonomi dan banyak sisi-sisi dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ini memicu permasalahan tidak langsung yakni adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah. Sebagai solusi, partai politik menjadi terbentuk karena masyarakat yang bersatu untuk melakukan perubahan pada sistem politik yang ada. Dengan ini partai politik menjadi kuat karena terikat erat dengan masyarakat yang membentuknya.

Teori lain yang menjelaskan mengenai terbentuknya partai politik adalah teori pembangunan. teori ini menjabarkan bahwa pembangunan menjadi faktor partai politik dapat terbentuk. Lebih-lebih modernisasi yang terjadi membuat adanya perubahan sosial ekonomi seperti adanya penemuan teknologi baru, industrialisasi, perluasan pendidikan, peningkatan industri media serta urbanisasi penduduk membuat peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ada. Adanya berbagai peningkatan tersebut menimbulkan kebutuhan akan partai politik yang mampu memadukan berbagai perubahan yang ada. Teori kedua dan ketiga memiliki similaritas, teori kedua mengandaikan pembentukan partai politik terjadi dari situasi krisis, sementara teori ketiga mengandaikan pembentukan partai politik terjadi dari perubahan menimbulkan konsekuensi positif yakni perubahan menimbulkan kebutuhan pembentukan partai politik.

Atas beberapa teori yang dikemukakan diatas, dapat ditarik benang merah bahwa partai politik menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mengakses pemerintahan dan kekuasaan demi menjalankan kepentingan bersama. Partai politik hadir sebagai alat untuk menghimpun segenap suara dari masyarakat untuk kemudian dapat disalurkan dan diwujudkan oleh pemerintah. Berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang, akhirnya partai politik memiliki peran dan fungsi yang cukup kompleks, lebih-lebih hadirnya partai politik ini akan menjadi penyambung kepada pemerintah. Secara sederhana dan awam, partai politik hanya dianggap sebagai alat untuk meraih kekuasaan demi kelancaran kepentingan yang bukan kepentingan bersama, namun idealnya partai politik memiliki peran yang lebih dari itu.

Ramlan Surbakti (1992) menyatakan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi, diantara lain:

1. Kaderisasi dan Rekrutmen Politik

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan proses seleksi dengan mengangkat seseorang atau beberapa orang untuk terlibat dalam sistem politik dan pemerintahan serta meningkatkan kualitasnya untuk menjabat dalam peran dalam sistem politik dan pemerintahan. Orang yang terlibat di dalam sistem dan pemerintahan ini kemudian akan mengisi ruang-ruang formal. Dalam hal yang berkaitan dengan pendelegasian kader partai politik dalam pemerintahan, orang tersebut haruslah memiliki kualitas yang mumpuni dalam berbagai hal. Hal tersebut karena pejabat pemerintahan dari partai politik akan menjalankan fungsi pemerintahan dan mengemban amanah yang akan bertanggung jawab atas banyak hal menyangkut urusan masyarakat.

2. Pemadu Kepentingan

Dalam suatu masyarakat, umum terdapat banyak kepentingan yang ada karena banyaknya kebutuhan yang ada. Kepentingan tersebut seringkali muncul pertentangan satu sama lain. Kehadiran partai politik menjadi penting karena partai politik akan memadukan banyaknya kepentingan yang

bertentangan ini. Partai politik akan menampung, menganalisis dan memadukan kepentingan yang ada sehingga dapat menjadikannya suatu kebijakan yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan tersebut.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat yang terlibat dalam proses politik yang ada. Proses politik yang dimaksud adalah proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun beberapa hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan diantara lain pengajuan tuntutan, pembayaran pajak, pelaksanaan keputusan dan dukungan atas pelaksanaan pemilihan umum. Partai politik dalam hal ini secara langsung dapat mendorong masyarakat dengan melakukan ajakan untuk terlibat dalam hal-hal politik.

4. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah sebuah proses untuk melakukan pembentukan atas orientasi politik kepada masyarakat. Dalam proses inilah diharapkan masyarakat mampu meningkat kesadaran politik dan akhirnya mampu terbentuk sikap untuk terlibat dalam berbagai proses politik. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialog dengan memberikan pembelajaran nilai-nilai. Indoktrinasi politik yang dimaksud adalah proses yang lebih melibatkan disiplin dan memungkinkannya menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa berkenaan dengan nilai-nilai yang akan diberikan.

5. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik merupakan proses dimana partai politik akan menyebarkan informasi-informasi. Informasi yang dimaksud merupakan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan-penjelasan. Komunikasi politik haruslah dilakukan dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya agar memudahkan masyarakat untuk menerima informasi. Informasi yang mudah disampaikan

akan menunjang kinerja pemerintahan dan partai politik sebagai komukator akan menjadikn sistem politik yang efektif.

6. Pengendalian Konflik

Konflik di dalam masyarakat sangat sering terjadi. Konflik terebut dapat berupa perbedaan pendapat sampai dengan bentrokan secara fisik dalam suatu sistem politik, adanya konflik bukan untuk menghilangkan dan mengabaikannya, namun untuk dituntaskan dan diselesaikan dengan menemukan solusi atas konflik tersebut. Partai Politik dalam konteks negara demokratis berfungsi untuk menghindarkan sifat destruktif dari suatu konflik agar memudahkan penyelesaian masalah dengan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

7. Kontrol Politik

Fungsi kontrol dalam partai politik ini adalah untuk menunjukkan penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dalam suatu kebijakan. Dalam fungsi ini partai politik haruslah mengedepankan objektivitas dalam kebijakan yang ada. Adapun Batasan kebaikan dan kebenaran berkaitan erat dengan nilai dan ideologi yang dianut oleh partai politik tersebut.

Selain daripada fungsi, partai politik memiliki tujuan. Tujuan tersebut sangat berkaitan erat dengan cita-cita partai. Cita-cita tersebut tentu memiliki dasar yakni nilai dan ideologi. Nilai dan ideologi itu kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat agar nilai tersebut dapat diresapi masyarakat pula. Seluruh keputusan yang dibuat oleh partai politik berdasarkan ideologi. Ideologi dan nilai ini akan diimplementasikan karena dianggap hal yang baik untuk menjadi cara bernegara dan perjuangan yang akan dilakukan.

1.6.2 Pelembagaan

Konsep pelembagaan, terutama dalam konteks partai politik telah dibahas oleh beberapa sarjana, salah satunya adalah Samuel Huntington—yang memberikan pandangan umum bagaimana pelembagaan itu terbentuk dalam sistem demokrasi. Dalam konteks pelembagaan partai politik, secara sederhana pelembagaan

dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik dalam merespon dinamika internal dan eksternal. Kemampuan partai memecahkan masalah-masalah internal serta merespons dan mengartikulasikan tuntutan realitas ekstrem dapat berdampak pada kemampuan membangun loyalitas serta memperluas basis dukungan dan kelangsungan partai. Pelembagaan sebagai proses penemuan nilai baku dalam membangun soliditas partai memunculkan metode tersendiri dalam pelembagaan partai. Metode pelembagaan partai secara inheren merepresentasikan tipologi pelembagaan hingga diwujudkan dalam bentuk tipe atau jenis-jenis partai politik. Menurut analisis Samuel Huntington (1968) yang melihat bagaimana proses pelembagaan partai politik di Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika dan Asia menyatakan bahwa pelembagaan partai politik merupakan hasil atas persaingan dan perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi. Dalam persaingan dan perluasan partisipasi dalam proses demokrasi tersebut, dapat dipahami bahwa makna pelembagaan menurut Huntington berakar dan bermuara pada upaya menemukan nilai baku dan stabil. Nilai baku dan stabil berarti nilai yang bersifat tetap, diakui dan diterima masyarakat sebagai patokan berbuat dan bertindak serta menjadi identitas berhubungan dengan komunitas masyarakat lainnya. Bentuk persaingan dan perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Huntington tersebut dalam kondisi masyarakat yang beragam menuntut partai politik mampu mengakomodasi banyak kepentingan agar tetap dapat eksis dan bersaing secara elektoral. Dan organisasi sayap partai politik merupakan salah satu pilar penting dari wujud sifat yang akomodatif tersebut.

Karakteristik partai politik yang sebagaimana disebutkan di atas erat kaitannya dengan karakteristik catch-all party. Tentunya dengan menggunakan sudut pandang bagaimana cara partai meraup dukungan politik dalam menghadapi pemilu atau pembentukan kebijakan di legislatif maupun eksekutif. Pada prinsipnya, penemuan nilai baku yang hidup di tengah masyarakat selain dimaksudkan sebagai dasar perekat (value infusion) untuk memperbesar mobilisasi dukungan, sekaligus menjadi jembatan aspirasi bagi masyarakat terhadap nilai baku yang dimaksud menjadi materi keputusan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, yakni negara.

Terdapat pandangan termutakhir mengenai pelebagaan, yang dikemukakan oleh Moshe Maor (2005) yang menyadari betul bahwa untuk dapat bertahan dalam arti pelebagaan tersebut, partai politik harus teruji dan didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya juga memiliki organisasi sayap atau yang disebut dengan *extra-parliamentary party organization* yang disadari berdasarkan jumlah basis pemilih. *“With a limited electorate it is easy for parties to direct elections; an enlarged electorate, however, demands the establishment of some form of extraparlimentary party organization.”* (Maor, 2005)” Bahkan menurut Huntington sendiri dalam proses pelebagaan partai politik yang dia lihat, dia tidak menutup mata adanya intervensi ekstra parlemen dalam proses pelebagaan partai politik tersebut. Sesuai sudut pandang Huntington, keberhasilan pelebagaan partai terletak pada kemampuan mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai di tengah peningkatan dan perluasan partisipasi politik. Kalkulasi demikian tidak dapat dipisahkan dari jumlah perolehan suara dalam persaingan di arena pemilihan umum sebagai manifestasi atas pelebagaan partai yang diperankan pada arena legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya.

1.6.3 Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam organisasi partai politik memungkinkan terjadinya konfigurasi dan dinamika tertentu. Keputusan yang diambil oleh Lembaga negara, partai politik, serta organisasi yang di dalamnya terdapat partisipasi public merupakan keputusan politik. Keputusan tersebut bersifat mengikat, dan mempengaruhi public atau masyarakat umum (Surbakti, 1992). Hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, masih menurut Ramlan Surbakti (1992), biasanya diurus oleh Lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, biasanya terdapat pilihan-pilihan alternative yang akhirnya dijadikan kesimpulan dalam memutuskan sesuatu berupa kebijakan, perintah, anjuran, aturan, atau yang lain-lainnya.

Ramlan Surbakti (1992) mengklasifikasikan keputusan politik menjadi dua. Pertama, keputusan berupa kebijakan yang berisi program-program pemerintahan,

yang mengatur perilaku warga negara dan hajat hidupnya. Kedua, orang-orang yang ditunjuk dan dipilih menjadi pejabat daerah atau pemerintah yang lebih tinggi.

Pembuat keputusan terbagi menjadi 3, yakni elit formal, yakni orang-orang yang memiliki jabatan di Lembaga tertentu sehingga dapat berwenang untuk membuat aturan dan undang-undang. Kemudian ada orang berpengaruh, yang memiliki kekuasaan informal seperti kekayaan, teknologi, social, serta organisasi massa yang dapat mempengaruhi elit formal. Biasanya, orang-orang berpengaruh di Indonesia memiliki keunggulan tertentu sehingga bisa menarik orang-orang banyak. Selanjutnya adalah penguasa. Penguasa berarti orang yang berkuasa di daerah tertentu. Elit formal dan orang berpengaruh juga bias menjadi penguasa.

Pembuatan keputusan dalam suatu organisasi tentu meninjau kekuatan organisasi tersebut terlebih dahulu, apakah organisasi tersebut merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan luas, pengaruh kuat misalnya dalam kontestasi tingkat tertentu atau menduduki jabatan-jabatan strategis di sebuah wilayah. Pengambilan keputusan ini tak jauh dari aktornya, yang berarti memiliki kuasa dalam menentukan.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai kelembagaan partai politik di PDIP berkaitan dengan sistem di dalam internal partai politik yang dilakukan dari sudut pandang DPC PDIP Surabaya. Adapun kelembagaan yang dimaksud adalah praktek dan pola dalam sistem yang selama ini terjadi, upaya kelembagaan untuk melakukan demokratisasi dan apakah proses membangun kelembagaan terjadi hingga struktur partai yang terkecil. Hal-hal berkaitan kelembagaan diatas kemudian akan dianalisis menggunakan teori kelembagaan partai politik.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Aminah dan Roikan, penelitian kualitatif deskriptif akan berguna untuk secara spesifik memahami sudut pandang subjek penelitian terhadap fenomena sosial yang ada. Didalamnya akan dijelaskan, digambarkan secara verbal, dicatat dan dianalisis fenomena yang ada dengan mendalam dan komprehensif. Adapun, menurut Husaini, tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif adalah melakukan penggambaran fenomena sosial yang faktual, aktual dan sistematis mengenai fakta dan hubungan antar peristiwa. Penelitian ini bukan hanya menggambarkan fenomena secara mendalam, namun juga secara meluas agar sebanyak-banyaknya informasi dapat diperoleh guna memberikan akurasi hubungan antar informasi dan fakta lapangan. Peneliti kemudian akan melakukan identifikasi informasi yang akan diperoleh dari narasumber, informan, serta sumber-sumber literatur maupun data pendukung lain seperti gambar, video maupun rekaman suara.

Metode kualitatif deskriptif akan digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kelembagaan PDIP serta bentuk, pola dan sistem yang cenderung terjadi didalam internal partai tersebut. Selaras dengan itu, penelitian ini juga berusaha akan mendalami bagaimana upaya pembagunan kelembagaan partai politik sehingga akan lebih sesuai apabila metode ini digunakan daripada metode kualitatif yang akan berfokus pada pencarian dan interpretasi data-data yang bersifat kalkulatif, numerik dan matematis.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah narasumber atau informan yang akan dimintai data dan akan menjadi data penelitian. Narasumber atau informan akan diwawancarai untuk didapatkan informasi. Berikut ini adalah daftar informan:

1. Dominikus Adi Sutarwijono selaku Ketua DPC PDIP Surabaya.

Alasan penulis memilih Adi Sutarwiyono adalah jabatan strategis yang dimilikinya di luar partai dan di dalam partai sebagai ketua DPRD Kota Surabaya dan Ketua Umum di DPC PDIP. Adi merupakan sosok yang dipercaya sebagai aktor yang membawa nama PDIP di pemerintahan lokal.

Adi juga merupakan kader sukses yang awalnya bergabung dengan PDIP sejak lama, sehingga bagi penulis, diasumsikan bahwa Adi memahami bagaimana sistem dan pelebagaan PDIP di ranah internal.

2. Kusnadi selaku Ketua DPD PDIP Jawa Timur.

Kusnadi merupakan Ketua DPD PDIP Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur di beberapa kesempatan. Penulis perlu menentukan Kusnadi sebagai salah satu narasumber karena dalam tubuh PDIP, kesinambungan antara pengurus Daerah dan Kota masih memiliki hirarki yang tegak lurus. Selain itu, Kusnadi merupakan salah satu senior PDIP yang mengerti bagaimana nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh PDIP dalam mengambil keputusan.

3. Boni Hargens selaku akademisi yang konsentrasi di bidang kelembagaan partai politik.

Penentuan Boni Hargens sebagai salah satu narasumber untuk penelitian ini sangat penting, mengingat partai politik di Indonesia termasuk memiliki pelebagaan dan sistem yang unik. Maka, dibutuhkan akademisi Indonesia untuk meninjau sistem dan pelebagaan partai politik dan mengaitkannya dengan PDIP.

4. Whisnu Sakti Buwana selaku mantan Ketua DPC PDIP Surabaya, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Jawa Timur dan Bakal Calon Walikota Surabaya.

Whisnu Sakti merupakan kader PDIP yang berkelindan di tubuh PDIP Kota Surabaya sejak lama, termasuk mendiang ayahandanya, Sutjipto. Whisnu terbilang memiliki faksi sendiri di PDIP Kota Surabaya selain faksi Bambang DH dan Risma. Maka, perlunya menjadikan Whisnu sebagai narasumber penelitian ini ialah untuk menemukan sudut pandang lain dalam penentuan cawali PDIP pada pilwali 2020 yang mana ia merupakan salah satu orang yang diusung oleh faksinya di internal PDIP.

5. Sahat Aritonang selaku Kader PDIP Surabaya.

Sahat Aritonang merupakan kader PDIP yang secara historis memiliki hubungan dengan PDIP. Ia merupakan putra dari Ibu Aritonang tokoh PDIP

Surabaya yang pernah menjadi Ketua DPC PDI di era 90-an sehingga diharapkan dapat menjelaskan secara detail dan terbuka bagaimana PDIP menjadi salah satu partai yang mengusung asas demokrasi, dan mengemukakan evaluasi dalam tubuh PDIP.

Dalam penelitian ini akan informasi yang didapat akan subjek penelitian diatas. Subjek akan dikembangkan kemudian menggunakan teknik snowball sampling demi mencari informasi sedalam-dalamnya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur, observasi secara langsung, riset pustaka dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan melakukan lebih dari satu metode, proses untuk mengumpulkan data yang akan dilakukan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara akan menjadi metode pertama untuk mencari data dari narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan yang dibuat berpedoman agar memiliki alur yang terarah. Wawancara akan dilakukan secara mendalam (*Indept Interview*) sehingga data yang akan didapatkan akan lebih komprehensif. Pertanyaan akan dikembangkan sesuai jawaban narasumber hingga menjawab kebutuhan data yang hendak diperoleh. Narasumber akan diminta informasi, tanggapan, pendapat terhadap permasalahan yang ada

2. Riset Pustaka

Riset Pustaka dalam penelitian ini berguna untuk melakukan pendalaman dari sumber-sumber berupa jurnal, artikel, surat kabar, artikel daring maupun data-data yang dimiliki berupa dokumen dan arsip yang berkenaan dengan subjek penelitian dan fokus penelitian yang kemudian akan menjadi sumber data sekunder

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat data yang peneliti peroleh dari informan di lapangan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk sebagai bukti ketika melakukan pencarian data di lapangan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Pasca melakukan proses pencarian data melalui wawancara mendalam, melakukan riset literatur maka akan dilakukan beberapa proses untuk menganalisis data yang diperoleh dengan:

1. Pemilahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diinventarisir dan dibagi-bagi sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang didapat dalam wawancara.

2. Penyederhanaan data atau reduksi data

Dalam proses ini, data akan disederhanakan dengan dirangkum dengan catatan akan tetap menjaga kedalaman substansi yang berkaitan dengan gagasan utama.

3. Menarik kesimpulan

Proses ini akan menjawab pertanyaan penelitian